



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI V DPR RI
DENGAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI**

- Tahun Sidang : 2024-2025
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 6
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2024
Waktu : Pukul 10.15 s.d 12.09 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK-V) Gedung Nusantara DPR RI
- Ketua Rapat : Roberth Rouw (F-NASDEM) – Wakil Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Membahas RKA K/L TA. 2025 Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN TA. 2025.
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kepala Bagian Sekretariat Komisi V DPR RI
- Hadir : A. Pimpinan Komisi V DPR RI:
1. Ir. Ridwan Bae (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-PG)
 2. Roberth Rouw (Wakil Ketua Komisi V DPR RI/F-Nasdem)
- B. Anggota Komisi V DPR RI:
- FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)
3. Mochamad Herviano
 4. Sri Rahayu
 5. Harvey B. Malaihollo
- FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)
6. Drs. Hamka B Kady, M.S.
- FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)
-
- FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)
7. Drs. H. Tamanuri, M.M.

la

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

-

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

-

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-
PKS)

8. Ir. H. Sigit Sosiantomo

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

9. Hj. Hanna Gayatri, S.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN (F-PPP)

-

- Izin : 1. Bob Andika Mamana Sitepu, S.H. (F-PDI Perjuangan)
2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E. (F-PG)
3. Drs. Fadholi, M. Ikom. (F-Nasdem)
4. H. An'im Falachudin Mahrus (F-PKB)
5. H. Boyman Harun, S.H. (F-PAN)
- Undangan : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI (Dr. Ir. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc.)
2. Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
3. Jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hari Rabu 28 Agustus 2024 pukul 10.15.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,
Yang terhormat Menteri PUPR beserta jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali Rapat Kerja hari ini mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam keadaan sehat walafiat .

Menurut laporan dari sekretariat, daftar hadir Anggota Komisi V DPR RI telah ditandatangani sebanyak 10 orang dari 55 Anggota dan terdiri dari 5 fraksi, sehingga telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, izinkanlah saya membuka rapat kerja pada hari ini dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada Menteri PUPR beserta seluruh jajarannya yang telah memenuhi undangan kami pada pagi hari ini.

Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri PUPR yang kami hormati,

Menindaklanjuti surat dari Pimpinan Banggar DPR RI tanggal 10 Juni 2024, perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2023 dan Rancangan Jadwal Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025, maka hari ini Komisi V DPR RI melaksanakan Rapat Kerja dengan mitra kerjanya dengan agenda membahas RKA K/L tahun anggaran 2025 Kementerian PUPR dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025. Dalam Nota Keuangan RAPBN tahun 2025, Kementerian PUPR memperoleh anggaran sebesar Rp75,63 triliun. Jumlah ini

sama dengan pagu indikatif yang disepakati dalam rapat kerja 6 Juni 2024 yang lalu. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan kegiatan prioritas seperti penyelesaian proyek strategis nasional, dukungan terhadap ketahanan pangan, peningkatan konektivitas, pembangunan infrastruktur dasar IKN dan padat karya, dan program padat karya tunai.

Dalam kesempatan ini perlu kiranya kita bangun kesepahaman bersama bahwa rapat kerja pada hari ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pembicaraan pendahuluan RAPN tahun anggaran 2025 yang telah kita laksanakan pada bulan Juni tahun 2025 lalu, eh 2024 lalu.

Selain itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dinyatakan bahwa tugas Komisi dalam bidang anggaran meliputi membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi.

Oleh karena itu, pada Raker hari ini Komisi V DPR RI hendak mendapatkan penjelasan dari Menteri PUPR terkait dengan alokasi anggaran dalam nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2025.

Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Kementerian PUPR antara lain:

1. Diperlukan untuk melanjutkan percepatan proyek strategis nasional dan program infrastruktur berbasis masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap sosial dan ekonomi seperti jalan tol, bendungan, serta prasarana air minum, dan sanitasi;

2. Meningkatkan akses ke sumber pembiayaan untuk proyek infrastruktur termasuk dengan mengoptimalkan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha;

3. Kementerian PUPR agar terus mengupayakan ketersediaan infrastruktur dalam rangka mitigasi bencana dan dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem serta mencegah *stunting*;

4. Perlu untuk terus mendorong pengembangan kawasan prioritas dan kawasan strategis nasional seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan perbatasan;

5. Diperlukan agar terus meningkatkan pemberdayaan dan keikutsertaan penyediaan jasa konstruksi di daerah di dalam setiap kegiatan pembangunan infrastruktur.

Saudara-Saudara yang berbahagia,

Demikian pengantar dari kami.

Selanjutnya kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan penjelasannya sesuai dengan agenda rapat kita pada hari ini.

Kami persilakan Saudara Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak-Bapak Pimpinan dan Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Sebelum kami mulai laporkan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025.

Pertama, kami mohonkan izin Ibu Direktur Jenderal Cipta Karya tidak bisa hadir, karena mewakili kami mendampingi Bapak Presiden melakukan peresmian di Yogyakarta.

Yang kedua, kami, Kementerian PUPR memohon maaf dan ikut duka cita yang dalam atas banjir bandang yang terjadi di Ternate. Saya merasa apa ya, belum bisa ke sana pada minggu ini. Mudah-mudahan Senin atau Selasa, kami akan upayakan ke sana, karena banyak korban yang menjadi korban banjir bandang tersebut.

Ibu-Bapak sekalian yang terhormat dan kami hormati,

Sesuai dengan undangan Bapak Wakil Ketua DPR tentang Raker Komisi V DPR ini, kami melaporkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian PUPR 2025 sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan tahun 2024 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor: B.20, tanggal 5 April, ditetapkan pagu indikatif Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp75.630.000.000.000,00. Ini sudah kami tindak lanjuti dengan surat kami Nomor: 0101, tanggal 29 Mei tentang Pemanfaatan Pagu Indikatif tersebut.

Pada tanggal 19 Juli, berdasarkan surat bersama Menteri Bappenas dan Menteri Keuangan terbit pagu anggaran Kementerian PUPR yang masih tetap, sebesar Rp75.630.000.000.000,00 dan kembali kami tindak lanjuti melalui surat kami tanggal 9 Agustus 2024, tentang Pemanfaatan Pagu Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2025 yang kami usulkan, sebagai berikut:

Yang pertama, Dirjen, pemanfaatannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi adalah untuk utamanya menyelesaikan program strategis nasional dan juga untuk yang pelayanan masyarakat.

Pagu anggaran Rp75.630.000.000.000,00 bagi Kementerian PUPR tahun 2025 kami usulkan untuk dialokasikan pada:

1. Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp26.530.000.000.000,00;
2. Direktorat Jenderal Bina Marga Rp32.310.000.000.000,00;
3. Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp10.480.000.000.000,00;
4. Direktorat Jenderal Perumahan Rp 4.530.000.000.000,00;
5. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Rp560.000.000.000,00; dan
6. Sekretariat, Inspektorat Jenderal, badan-badan lainnya sebesar Rp1.220.000.000.000,00.

Rincian bagi pemanfaatan anggaran tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:

Untuk Bidang Sumber Daya Air sebesar Rp26.530.000.000.000,00.

Kegiatan prioritas, antara lain untuk pembangunan kembali lagi menyelesaikan 17 unit bendungan yang akan kita selesaikan pada tahun 2025 yaitu Bendungan Jenelata Sulawesi Selatan, Cibeet Jabar, Cijurey Jabar, Riam Kiwa Kalimantan Selatan, Cabean di Jateng, Karangnongko Jawa Tengah, Pelosika di Sultra, Tiga Dihaji Sumsel, Bendungan Bener di Jawa Tengah, Bendungan Mbay di NTT, Bendungan Pengarah Rukoh di Aceh, Budong-Budong Bendungan di Sulbar, Bendungan Bagong di Jatim, Bendungan Jragung di Jateng, Manikin di NTT, Way Apu Maluku, dan Bulango Ulu di Gorontalo.

Kemudian untuk pembangunan irigasi baru seluas 2.000 hektar antara lain di Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Jambi, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan merehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, ini sesuai dengan program ketahanan pangan di tahun 2025 sampai 2029 nanti. Rehabilitasi irigasi ini di DI Rentang di Jabar, Way Sekampung di Lampung, Jragung di Jateng, Pacal di Jatim, Baro Raya di Aceh, Seluma di Bengkulu, Cisadane di Banten, Ciujung di Banten, Ameroro di Sultra, Daerah Irigasi Rawa Dadahup di Kalteng, Daerah Irigasi Leuwigoong di Jabar, dan Bendung di DI Randangan di Gorontalo.

Kemudian pembangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai sepanjang 32,5 kilometer, antara lain Sungai Pamaluan di Kaltim, Kali Bekasi di Jabar, Kali Kaluku di Sulbar, Ciliwung Jakarta, Batang Lembang di Sumbar, Air Bengkulu di Bengkulu, Sungai Bendung di Sumsel di Kota Palembang, Sungai Buntung di Jatim, Sabo Dam Marapi di Sumbar, sebagai hasil erupsi yang kemarin, pengamanan pulau terluar Provinsi Kepri, pengamanan Pantai 3 Gili, Sungai Tondano, Sungai Tikala Kota Manado, Sungai Badera, Sungai Selayang Kota Medan, dan lain-lainnya.

Kemudian pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m³/detik, antara lain di Karian Banten untuk memanfaatkan bendung

Bendungan Karian, kemudian Air Baku Lohbener di, di Jabar, Air Baku Kabupaten Kobar di Kalteng, DAS Kawal di Kepri, Air Baku Kabupaten Gorontalo Utara, Air Baku Kota Tangsel di Banten, dan Air Baku Pulau Enggano di Bengkulu. Demikian juga kami upayakan untuk melakukan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat P3-TGAI di 2.000 lokasi.

Kemudian di bidang bina marga, alokasi anggarannya kami alokasikan sebesar Rp32.310.000.000.000,00 dengan kegiatan prioritas antara lain:

Untuk peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 5,07 kilometer yang merupakan dukungan konstruksi untuk investasi jalan tol, yaitu di Serang-Panimbang, Semarang-Demak, akses Pelabuhan Patimban Tol IKN Seksi 3A Fase 2 Segmen Karangjoang-KKT Kariangu, dan Tol Seksi 3B 2 Segmen KKT Kariangu-Simpang Tempadung.

Kemudian pembangunan jalan sepanjang 104,88 kilometer antara Jantho-Keumala Aceh, Labuhan Bajo-Sigapokna Sumbar, Tering-Long Bagun Kaltim, Malinau-Semamu Kaltara, Batas Kota Singaraja-Mengwitani Bali, Manado Outer Ring Road II tahap 4 di Sulut, Kota Baru-Air Nanang Maluku, Warmare-Anggi Papua Barat, Waghete-Timika Papua Tengah, Iwur-Waropko Papua Selatan, dan Towe Hitam-Oksibil di Papua Pegunungan.

Kemudian yang ketiga adalah pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 1.662 meter antara lain di Jembatan Aek Batahan di Sumut, Jembatan Tratak Buluh di Riau, Jembatan Ruas Nanga Era-Batas Kaltim Kalbar, Pile Slab Aruk-Batas Kecamatan Siding/Seluar Kalbar, Jembatan Sungai Balandete Sultra, dan Jembatan Rendani di Papua Barat, Oksibil-Iwur di Papua Pegunungan. Peningkatan aksesibilitas *flyover/underpass/terowongan* sepanjang 142 meter, antara lain Flyover Sudirman di Sumsel, *Underpass* Bitung di Banten.

Kemudian peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 1.642 kilometer serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.394 meter. Preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 kilometer, jembatan nasional sepanjang 548.513 meter dan padat karya rutin jalan dan jembatan. Kemudian juga masih bisa dialokasikan untuk dukungan IKN, yaitu pembangunan jalan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan jalan tol IKN, dan Jembatan Pulau Balang.

Yang ketiga, bidang cipta karya sebesar Rp10.480.000.000.000,00 dengan kegiatan prioritas, antara lain:

Pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 752 liter/detik, antara lain di pembangunan SPAM Regional Wosusokas di Jawa Tengah, Wonogiri, pembangunan SPAM UNSRI Kabupaten Ogan Ilir, prasarana SPAM IKN jaringan interkoneksi IPA Sepaku Semoi, JDU-JDP, SPAM Sepaku wilayah pengembangan 1A tahap 2, JDU-JDP SPAM Sepaku wilayah pengembangan 1B dan 1C. Perluasan SPAM 42.452 sambungan rumah, antara lain di perluasan jaringan perpipaan SPAM Kamijoro di Kabupaten Kulonprogo, Sistem Hilir SPAM Regional Karian-Serpong Optimalisasi SPAM IKK

Donggala, SPAM Sebaif Grati Kabupaten Pasuruan, dan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) berupa Pamsimas di 500 lokasi desa.

Kemudian, kami lanjutkan untuk pembangunan sistem pengelolaan air limbah bagi 21.330 KK ada di Jakarta sewerage zona 1, jaringan perpipaan air limbah Kecamatan Tamalate Kota Makassar, jaringan perpipaan air limbah 1, 2, 3, KIPP IKN. Sistem pengelolaan persampahan 6.200 KK, antara lain di pembangunan TPST Kota Cilegon, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bandung, Kabupaten Indramayu, dan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat meliputi kegiatan Sanimas di 400 lokasi dan TPS3R di 100 lokasi.

Kemudian pengembangan kawasan permukiman seluas 83,2 hektar, antara lain untuk pembangunan infrastruktur Tanjung Banun, penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah, karena ini Pemda sudah mengalihkan jalan rayanya sehingga kami melakukan penataan kawasan di Danau Dendam Tak Sudah, kemudian kawasan perkotaan Muaro Bungo, dan kawasan Morowali.

Peningkatan kualitas pemukiman kumuh 81 hektar eh 81,30 hektar, antara lain di penataan kawasan Medan Belawan Tahap II, karena ini di bibir pantai, sehingga terjadi banjir dan merupakan kawasan untuk pembebasan kemiskinan ekstrem bersama dengan PMK, Menko PMK, dan PKKBM.

Kemudian peningkatan kualitas permukiman kumuh kawasan Lililef Waibulan Weda Maluku Utara, kawasan Pulau Penyengat Kabupaten Riau. penataan kawasan pariwisata prioritas, antara lain di penatan kawasan wisata di Bangka Belitung dan kegiatan infrastruktur masyarakat berupa kegiatan PISEW di 540 lokasi, dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan gedung 8.300 m², antara lain untuk pembangunan Mako Paspampres, Gedung KONI, renovasi KBRI di Malaysia, Gedung Persatuan Wredatama RI (PWRI) dan pembangunan ruang bermain ramah anak di Kabupaten Asmat. Selanjutnya, pengembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di 9 kawasan untuk revitalisasi Gedung Merdeka untuk mendukung Konverensi Asia Afrika dan prasarana mendukung IKN, antara lain bangunan gedung dan kawasan kantor IKN, kantor Sarpras pemerintahan II, dan kantor PUPR.

Rehabilitasi dan renovasi sekolah madrasah sebanyak 56 unit, antara lain rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah di Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur.

Rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri 22 unit, antara lain untuk pembangunan Gedung GIK UGM Tahap II, Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri di Kepulauan Babel, dan lain-lain.

Rehabilitasi dan renovasi pasar sebanyak 6 unit, antara lain renovasi Pasar Induk Banyuwangi, Pasar Terban Yogyakarta, Pasar Sungai Penuh, Pasar Purwodadi Grobogan, dan lain-lain.

Rehabilitasi dan renovasi prasarana strategis lainnya, antara lain Universitas Syeikh Nawawi Al-Batani, dan UNUPI Persis, serta pelaksanaan strategis mendukung IKN berupa pembangunan sekolah, pasar, dan Puskesmas di kawasan hunian ASN.

Dukungan teknis lainnya, antara lain untuk pembinaan gedung, bangunan gedung hijau dan bangunan cerdas, fasilitasi pusat studi kegemampuan, perencanaan dan pengendalian, pengembangan teknologi air minum dan sanitasi, tanggap darurat dan tanggap bencana serta gaji dan tunjangan, operasional kantor, dan administrasi kesatkeran.

Yang keempat, bidang perumahan sebesar Rp4.530.000.000.000,00 dengan kegiatan prioritas, antara lain:

Lanjutan pembangunan hunian vertikal untuk personil TNI di IKN sebanyak 240 unit, penuntasan pembangunan 47 *tower* Rusun ASN dan Hankam sebanyak 2.820 unit, lanjutan pembangunan rumah susun mendukung daerah otonomi baru sebanyak 360 unit, lanjutan pembangunan rumah susun reguler sebanyak 530 unit, pembangunan baru rumah susun terdampak IKN sebesar 44 unit, pembangunan baru rumah susun ASN/TNI/Polri, pekerja, lembaga perguruan tinggi, dan lembaga perguruan bersa..., berasrama sebanyak 2.207 unit, dan lanjutan pemeliharaan perawatan *tower* rumah susun wisma atlet Kemayoran sebanyak 10 *tower*.

Ibu-Bapak sekalian,

Khusus untuk yang wisma atlet Kemayoran sedang disiapkan Inpres-nya untuk memanfaatkan, mengoptimalkan pemanfaatan wisma atlet Kemayoran ini. Kira-kira 50% untuk ASN, 50% untuk dikomersialkan.

Kemudian pembangunan rumah khusus sebanyak 606 unit, termasuk untuk mendukung DOB sebanyak 50 unit, serta pembangunan rumah khusus untuk masyarakat terdampak bencana, terdampak program pemerintah, daerah 3T sebanyak 556 unit. Kemudian Pembangunan PSI, PSU sebanyak 10.850 unit untuk perumahan yang tersebar di seluruh provinsi.

Pembangunan rumah swadaya skema BSPS melalui program padat karya sebanyak 18.235 unit. Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Pembiayaan Perumahan eh Infrastruktur PU dan Perumahan, BPSDM, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Sekretariat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.770.000.000.000,00.

Ibu-Bapak sekalian,

Apa yang kami sampaikan tadi adalah berdasarkan alokasi pagu indikatif yang terakhir atas surat bersama Menteri PPN, Bappenas, dan Menteri Keuangan, tanggal 19 Juli 2023.

Kemudian menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, dan Bapak Presiden terpilih Republik Indonesia, serta Ibu Menteri Keuangan pada Rapat Terbatas tanggal 5 Agustus 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025, Kementerian PUPR telah menyampaikan usulan tambahan melalui surat Menteri PUPR Nomor 725, tanggal 8 Agustus, dengan penjelasan sebagai berikut:

Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136.950.000.000.000,00. Saat ini pagu anggaran 2025 sebesar Rp75.630.000.000.000,00, sehingga masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp61.310.000.000.000,00. Sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi tentang usulan tambahan ini.

Prioritas tambahan anggaran akan digunakan, antara lain untuk dukungan ketahanan pangan dan energi, yaitu penyelesaian bendungan *On-going* dan rencana bendungan baru, pembangunan..., pembangunan baru bendungan 5 tahun ke depan, ditargetkan sekitar 50 bendungan.

Kemudian pembangunan jaringan tersier dan cetak sawah. Berdasarkan dengan Perpres yang baru pembangunan cetak sawah dan tersier ini berada ditugaskan kepada Kementerian PUPR.

Kemudian pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pembangunan bendung-bendung untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi kita. Kemudian tambahan anggaran juga untuk pembangunan jaringan air baku dan bendungan.

Penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN, pembangunan Infrastruktur DOB Papua karena ini masih baru mulai pada akhir tahun ini tahun 2024, sehingga masih perlu diperlukan banyak lagi infrastruktur bagi DOB Papua ini.

Kemudian pembangunan jalan bebas hambatan dalam arti dukungan konstruksinya untuk meningkatkan nilai IRR-nya, dan pembangunan jembatan gantung, pembangunan SPAM, air minum, dan layanan pengelolaan air limbah. Seperti kemarin di Lampung diresmikan SPAM Lampung KPBU untuk 60.000 sambungan rumah, yang dimanfaatkan sekarang baru 13.000. Jadi masih dibutuhkan bantuannya melalui Inpres Air Minum dan Air Limbah tersebut.

Kemudian juga pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi, olahraga, dan pasar. Dan yang selanjutnya adalah pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler, dan bantuan PSU bidang perumahan serta infrastruktur berbasis masyarakat, seperti BSPS, P3-TGAI, PISEW, dan lain sebagainya.

Bapak-Bapak Ketua,
Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V yang terhormat dan kami hormati,

Selanjutnya, kami ingin melaporkan pembangunan Ibu Kota Nusantara/ IKN. Dukungan infrastruktur dasar IKN pada pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025, ini sebesar 4,19 triliun. Jadi dari 75 triliun pagu indikatif, 630 miliar, kami alokasikan untuk IKN sebesar 4 triliun 190 miliar untuk digunakan dalam infrastruktur sumber daya air sebesar 80 miliar untuk, yaitu untuk pengendalian banjir DAS Pamaluan, pembangunan *intake* dan pipa transmisi air baku Riko Kernain Kabupaten Penajam Paser Utara. Ini bagian dari luar IKN, tapi kami ingin melayani masyarakat untuk air minumnya, dan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana IKN.

Kemudian untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar 1 triliun 660 miliar antara lain untuk pembangunan jalan Tol Seksi 3A-2 Segmen Karangjoang-KTT, KKT-Kariangau, pembangunan jalan Tol Seksi 3B-2 Segmen KKT-Kariangau-Simpang Tempadung, dan pengawasan teknik duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek yang kedua.

Kemudian tiga, 4 triliun 190 miliar sebagian dipakai untuk infrastruktur pemukiman sebesar 1 triliun antara lain untuk pembangunan bangunan Gedung *Wing 2* dan kawasan Kantor Kementerian PUPR, pembangunan gedung dan kawasan Kantor IKN, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan II di IKN, pembangunan jaringan perpipaan air limbah 1, 2, 3 KIPP Ibu Kota Negara, pembangunan JDU-JDP, SPAM Sepaku sub-wilayah pengembangan 1A Tahap 2, serta lanjutan pembangunan jaringan interkoneksi IPA Sepaku Semoi ke I Sepaku IPA Sepaku, dan pembangunan JDU-JDP wilayah B 1B dan 1C SPAM Sepaku.

Kemudian juga digunakan untuk infrastruktur perumahan sebesar 1 triliun 450 miliar untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI sebanyak 4 *tower*, penuntasan pembangunan 47 tower Rusun ASN dan HAM.

Di luar alokasi tersebut,

Bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat,

Masih terdapat usulan tambahan anggaran tahun 2025 untuk penyelesaian dan penuntasan pembangunan IKN pada Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, dan Bidang Perumahan, sebesar 20,320 triliun, sehingga untuk IKN kami membutuhkan anggaran sebesar 24,510 triliun. Yang baru dialokasikan di pagu indikatif adalah 4 triliun 190 miliar. Jadi kekurangannya masih 20 triliun 320 miliar.

Ibu-Bapak sekalian yang kami hormati,

Kiranya itu yang dapat kami laporkan. Mohon arahan dan dukungan terutama untuk tambahan anggaran. Mudah-mudahan Anggota Badan Anggaran yang ada di Komisi V dapat memahami dan mendukung kekurangan anggaran, karena ini kalau menurut informasi masih ada ruang fiskal bagi Presiden terpilih untuk mengalokasikannya, pasti dia akan melalui Badan Anggaran.

Bapak-Ibu sekalian,

Demikian kami laporkan, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Walaikumsalam.

Baik.

Demikianlah penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri PUPR.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk memberikan pertanyaan dan pendalaman.

Yang pertama Pak Tamanuri, silakan.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Panjang-panjang saja, Pak. Panjang-panjang saja, kurang-kurang.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

Kurang-kurang.

Yang saya hormati Pimpinan,
Yang saya banggakan Pak Menteri beserta Pak Dirjen, Pak Sekjen, dan
Hadirin bahagia,

Setelah Pak Menteri menyajikan untuk pembangunan tahun 2025, rasanya terbuka hati ini. Di mana menyangkut semua hal kalau uang itu ditambah, kalau yang hanya 76 itu saja ya, *ngonci lah* dari situ. Maka harapan kita adalah supaya usulan Pak Menteri bisa dipenuhi. Yang mendesak di tempat saya adalah pertama kali Irigasi Curup Agra Guruh Way Sekampung.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Argoguruh.

F-NASDEM (DRS. H. TAMANURI, M.M.):

h

Argoguruh Way Sekampung, yang panjangnya enggak tahu saya, irigasinya yang tembus ke Lampung Timur. Itu kalau permukaan air penuh, maka enggak kelihatan itu yang di bawahnya. Yang di bawahnya itu Pak Bob, itu sudah ompong semua irigasinya. Jadi banyak *waste*-nya itu hilang.

Jadi yang kita harapkan, Pak Presiden harapkan dari atas itu yang nambah 15.000 hektar untuk mengalir 15.000 hektar sawah, kalau dia banyak bolong-bolong, gitu, enggak sampai, enggak sampai. Ya, sama saja contoh yang sering saya katakan jember apa Bendungan Way Rarem. Pak Harto tahun '82 mencanangkan bahwa itu 22.000 hektar, tapi sekarang hanya 9.000 hektar, karena itu, karena banyak kerusakan-kerusakan di bawah itu. Oleh karena itu, dari pengamatan kami, kami minta supaya waktu di, airnya dialihkan, cobalah kita segera perbaiki irigasi ini yang di bawahnya. Kalau di atasnya bagus, Pak, di atasnya bagus, tapi bawahnya itu. Jadi *casing*-nya itu bagus, cuman isinya yang kurang bagus.

Kemudian harapan saya adalah yang tempat Bapak turun bersama Pak Presiden, Stadion itu, Pak, di Kota Bumi. Stadion itu dibangun tahun '86, sekarang tempat duduknya sudah enggak ada lagi, tinggal lagi kerangkanya saja bunder. *Nah*, oleh karena itu, kalau kira-kira nambah anggaran Bapak ini, mohon dapat dicatat, dicatat dan direalisasi.

Kedua, rumah susun ITERA, 3 tahun yang lalu kita pernah bantu rumah susun ITERA, satu rumah susun yang di situ dikasih merek rumah Rumah Susun Tamanuri. *Nah*, ini ditambah lagi dengan 3 kilometer jalan. Ini semakin menambah mahasiswa, sekarang sudah, dulu 23.000 sekarang jadi 27.000.

Jadi, harapan saya adalah ya mohon ditambah lah rumah susun satu. Sebabnya mereka itu mengharapka itu, mahasiswa ini berlomba-lomba masuk situ, karena sewanya murah dan mereka enggak keluar dari kampus, *nah* ini. Kemudian di lingkungan itu masih hampir 50% atau 60% tanah semua, kalau waktu musim hujan, becek, kalau waktu musim kemarau debu semua. Jadi, harapan saya adalah bisa ditambah, walaupun enggak bagus jalannya asal, asal diperkeras lah.

Kemudian kan mereka ini mahasiswa, sekarang ini dari ITERA itu banyak nyewa di seberang. Jadi, mereka kalau waktu pagi itu berduyun-duyun nyeberang. Jadi, harapan saya adalah yang paling efisien *underpass*, kalau *bypass* terlalu mahal, *underpass*. Dari sebelah ini *nyebrang* ke ITERA, jadi mereka itu tidak tidak mengganggu dan tidak diharapkan ada kecelakaan-kecelakaan. Saya rasa demikian, saya selalu mendoakan Bapak supaya uang kita yang 70, 61 triliun ini bisa teralisasi, sehingga semua harapan-harapan yang sudah dicurah ke Bapak itu bisa kita nikmati.

Sekian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Walaikumsalam.

Baik.

Selanjutnya Pak Hamka, silakan.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Pak Menteri dan seluruh jajaran Eselon I dan II,

Saya belum bisa mengelaborasi secara detail, hanya ada yang saya ingin tanyakan kepada Pak Menteri, terkait penambahan-penambahan anggaran.

Tambahan anggaran yang pertama itu 61,31 terdiri dari SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan. Ditambah lagi yang di belakang masih ada 20 triliun belum IKN, ini cukup tinggi kebutuhannya.

Nah, saya juga mendapatkan data Pak Menteri, masih ada kegiatan yang merupakan tanggung jawab Bapak atau tanggung jawab kementerian di dalam program *quick wins* pemerintah baru 2025. Yang pertama, itu ada empat sebenarnya yang *quick wins*: makan bergizi gratis ya, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis, yang Pak Menteri kena tugas di sini adalah renovasi sekolah seluruh Indonesia yang harus pertanggungjawabannya juga kepada Pak Menteri.

Yang kedua, tugasnya Pak Menteri lagi Kementerian PUPR, lumbung pangan nasional. Jadi ada empat poin di dalam pelaksanaan anggaran yang harus dipikirkan tambahannya lagi.

Perlu saya sampaikan di sini, bahwa memang APBN kita tahun 2024 kemarin itu hanya 3.325 triliun. Sekarang ini 3.619 triliun, Pak Menteri, ada kenaikan kurang lebih Rp288 triliun.

Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah apakah tambahan-tambahan nanti tugas-tugas Bapak yang seperti membangun sekolah, merenovasi sekolah yang harus berkoordinasi dengan Kemenag, dan Kemendikbud, dan Kementerian Pertanian ini tidak masuk dalam tambahan yang diusulkan tadi, *gitu loh*. Apakah di luar dari itu, berarti kalau di luar dari itu masih banyak tambahan yang harus Pak Menteri usulkan. *Nah*, itu yang ingin saya sampaikan.

h

Kemudian kalau yang normal sekarang 75 triliun ya tentu IBM ini masih jauh, Pak Menteri. Saya hitung BSPS saja, tadi hanya berapa hanya rata-rata kalau 54 Anggota, 18.000, kalau saya tidak salah BSPS. Kalau 54 anggota, taruhlah misalnya Anggota semua merupakan aspirasi mereka, itu 388 unit saja rumah.

Nah, ini juga menurut saya perlu kita cermati agar supaya dalam penyusunan satuan tiga nanti itu bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan. Walaupun saya tahu persis dengan anggaran 75 triliun itu memang sangat tidak memungkinkan untuk itu. Yang bisa kita lakukan atas kesepakatan kita karena kewenangan kita bersama di sini untuk menyesuaikan, kalau sepakat kita tentu harus ada pergeseran. Kita tunggu nanti Pak Menteri karena juga masih bergulir pembahasannya di Badan Anggaran sejak kemarin kita mulai dan sebentar lagi lanjut mengenai tambahan-tambahan anggaran seperti apa yang Pak Menteri sampaikan.

Nah, yang ingin saya perdalam di sini adalah mudah-mudahan ada info dari Pak Menteri adalah tugas Bapak merenovasi sekolah seluruh Indonesia ya, membangun apa lumbung pangan modelnya kayak apa, apa bentuknya seperti apa, saya belum tahu. Apakah Bapak sudah bisa membayangkan dari mana sumber dananya?, apakah sudah diusulkan ini?, karena ini adalah program pemerintahan baru, ya. Ini barangkali sekedar untuk bayangan saja karena kita belum bisa detail, ya nanti mungkin Eselon I setelah *fix* anggarannya anggaran tambahan dan anggaran yang sudah di, menjadi pagu sekarang.

Saya kira itu saja Pimpinan. Mudah-mudahan ada penjelasan dari Pak Menteri. Mudah-mudahan Pak Menteri juga sudah tahu ini.

Kemudian yang terakhir, sebelum saya akhiri saya menitipkan kepada Pak Menteri ini juga Instruksi Presiden mengenai pembangunan Stadion Sudiang di Makassar yang notabene sudah di-apa namanya, bahkan sudah dijanji akan selesai perencanaannya pada bulan September. Saya tidak tahu sebentar itu anggarannya seperti apa nanti dan dari mana.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik.

Hari ini, Anggotanya pendek-pendek ngomong-nya, enggak panjang.

h

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Eenggak panjang?

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Iya.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Belum panjang, nanti akan banyak.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Matiin dulu itu, *mic*-nya, dua-dua.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Isi-isinya.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Pak Tamanuri, matiin.

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Jangan dipaksa-paksa, Pak.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Iya, baik.

Selanjutnya Bu Sri Rahayu, saya persilakan.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V,
Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini,

Yang pertama, harapan kami tentu saya secara pribadi maupun fraksi kami mengharapkan bahwa semua program-program yang terkait padat karya,

maupun program yang secara langsung diterima oleh masyarakat, itu kami berharap bahwa itu dipertahankan untuk dianggarkan. Kenapa? Karena memang dampaknya luar biasa untuk itu termasuk BSPS, Irigasi, kemudian inpras, *eh* Inpres Jalan, kemudian PISEW, itu semua termasuk sanitasi, itu sangat-sangat bermanfaat bagi warga masyarakat, dan dengan adanya pembangunan itu, masyarakat merasa *happy*, merasa bahagia, dan itu kelihatan betul, kita bisa merasakan, ketika saya mengunjungi secara langsung kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan-bantuan program tersebut.

Terutama juga kepada para kelompok-kelompok tani yang menerima P3-TGAI, jembatan, semuanya yang untuk masyarakat kecil yang dirasakan secara langsung itu betul-betul membahagiakan dan oleh sebab itu kami mendukung dan sepenuhnya untuk kenaikan program itu atau bahkan mungkin karena adanya IKN tetap pun akan menjadi kebahagiaan bagi kami. Namun demikian pada kenyataannya tidak demikian untuk di tahun 2025.

Saya ingin menanyakan beberapa hal yang terkait anggaran yang ada di sini kami lihat. Saya mulai dari ini dulu, SDA.

Pak, kemarin ada audiensi di Komisi V kebetulan saya terima. Mereka menyampaikan dengan ada hanya peraturan menteri apa pemerintah, ya kemarin saya lupa, itu bahwa sekarang kewenangan air bawah tanah itu kan kewenangan dari pusat, dan mereka menyampaikan bagaimana dengan adanya sumber, sumber air yang bawah tanah yang sudah ada, terutama di fasilitas-fasilitas kesehatan, fasilitas umum, ya, baik itu fasilitas kesehatan yang dimiliki secara apa, pribadi ataupun komunitas ataupun apapun, itu sekarang menjadi bidikan APH, Pak. Ini bagaimana cara mengatasinya, tolong ini dikoordinasikan, dikomunikasikan supaya tidak terjadi demikian. Kalau dilihat dan kemudian disandingkan dengan aturan kan pasti kalah mereka padahal adanya itu sebelum ada aturan itu. Tolong ini menjadi perhatian.

Kemudian yang kedua, saya mau minta penjelasan lumpur Lapindo itu sampai kapan itu harus dianggarkan terus. Padahal kan kalau yang tahun kemarin anggarannya katanya untuk meninggikan temboknya supaya, apakah tidak ada teknis, sehingga tembok itu tidak terus, bisa-bisa jadi seperti bangunan yang kayak candi begitu tinggi banget, *gitu*, dan itu berbahaya tentu saja. Tolong saya diberi penjelasan.

Kemudian ada hal lain, bagaimana juga kerja samanya antara provinsi, nasional, kemudian kabupaten/kota terkait dengan sungai-sungai yang menjadi kewenangan nasional, milik nasional, kalau ada persoalan-persoalan yang misalkan bangunan-bangunan yang ada di bibir sungai padahal aturannya ada. Tolong ini menjadi perhatian, Pak. Semakin lama semakin padat dan bahkan kadang-kadang pilarnya itu pilar, apa istilahnya ya, di belakang sendiri itu di sungai malah bukan di bibir, begitu.

Lalu komunikasi, koordinasinya seperti apa? karena pasti kalau dari sudut aturan tidak bisa makanya saya tanyakan komunikasinya karena di dalam aturannya yang saya ingat 7..., 7 meter dari bibir sungai itu tidak boleh, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Kalau kita lihat di mana pun berada

terutama di kota-kota yang dilalui sungai itu pasti demikian. Lalu kalau ada persoalan-persoalan, nasional pasti tidak mau tahu begitu kan. Oh ini aturannya sudah seperti itu. Tolong ini ini menjadi perhatian juga.

Kemudian untuk Bina Marga, Pak Menteri, jalan, jalan lingkaran selatan itu cukup bagus dan itu memberikan memberikan harapan bagi warga masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan perekonomian dan dulu juga memang tujuannya untuk meningkatkan perekonomian, sehingga dibangun lah jalan itu.

Lalu sampai hari ini yang dari Malang menuju Blitar, Blitar-Tulungagung, belum, oh, Blitar Iya. Sekarang yang sudah selesai Tulungagung, Blitar baru sedikit. Nah, kemudian Trenggalek juga belum. Kalau itu tidak, kalau saya perhatikan tidak dianggarkan di sini. Kalau itu tidak dianggarkan, saya khawatir jalan itu sudah dilalui, tetapi karena lamanya jarak antara sambungan yang satu dengan sambungan yang lain atau istilahnya bet atau apa bagian, maka itu jalan rusak terlebih dahulu dan kekumuhan-kekumuhan di pinggir jalan itu sangat luar biasa. Tolong ini menjadi perhatian, karena kalau itu jalan itu jadi, Pak, luar biasa, Pak, perekonomian mulai dari Malang, Blitar, kemudian Tulungagung, Trenggalek bisa dibawa ke Jawa Tengah, itu dengan waktu yang relatif singkat. Tolong menjadi perhatian jalan lingkaran selatan. Terutama juga yang sudah jadi di Tulungagung, ini sirip-siripnya juga menjadi penting, Pak, sirip-sirip jalannya ini juga menjadi perhatian. Jangan sampai itu jalan yang mestinya bisa dilalui oleh warga masyarakat dengan cepat, dengan tujuan juga cepat tetapi karena belum ada, maka itu juga menjadi terkendala bagi warga masyarakat penggunaanya juga.

Kemudian saya berharap Inpres ini juga tetap jalan, Pak. Tetap bisa dimasukkan di dalam program-program karena betul-betul luar biasa untuk Inpres ini yang selama ini kabupaten/kota itu tidak mampu untuk membangun dengan adanya Inpres kemarin, saya terima kasih sekali di Kabupaten Blitar dan Tulungagung yang memang warga masyarakatnya sangat-sangat membutuhkan, itu bisa terbangun. Meskipun hal yang sebenarnya harus dibangun terlebih dahulu malah belum. Mohon dengan hormat untuk Inpres kami juga diberikan kesempatan untuk itu yang sudah kami usulkan.

Berikutnya untuk perumahan. Tadi infonya untuk rumah susun, Pak, saya mohon dengan hormat dan sangat seperti yang saya sampaikan sebelumnya tahun 2023, program 2023 tolong direalisasi, Pak, saya mohon dengan hormat dan sangat, karena malu saya karena sudah berkali-kali ini, tapi belum direalisasi. Padahal 2023, informasi yang saya dengar, iya 2024 awal, tetapi sampai hari ini belum juga gitu belum belum dibangun untuk itu.

Untuk pasar, itu pasar ini Cipta Karya ya? Saya membaca di programnya ini yang dulu sudah pernah kita kunjungi kunjungan spesifik ke pasar itu sudah kami usulkan tetapi saya melihat di sini juga belum ada, belum ada programnya padahal sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tolong ini juga menjadi perhatian karena kalau kita sudah ke sana kemudian sudah juga turun dari Kementerian sudah turun juga maka kalau kemudian zonk kita juga jadi pertanyaan. Meskipun kita juga enggak tahu, apakah nanti ditempatkan di Komisi V atau

tidak kami tidak tahu tapi paling tidak ada fraksi kami yang ada di Komisi V sehingga kami tetap bisa menyampaikan.

Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan untuk program-program yang terkait dengan P..., TPS3R. Mohon evaluasi Bapak-Bapak sekalian dan Ibu, untuk TPS3R ini tolong dievaluasi, mana-mana yang berhasil dan mana-mana yang tidak karena dalam kenyataannya di lapangan tidak mudah untuk mengelola itu. Karena dibutuhkan, pertama, kontinuitas terhadap sampah yang harus masuk di situ, kemudian juga kuantitas sampah yang masuk, demikian juga yang perlu diperhitungkan bahan bakarnya juga dibutuhkan, tenaga, dan seterusnya.

Ternyata kalau saya perhatikan tidak semua desa yang diberi itu tidak, tidak semuanya mampu, tidak semuanya mampu untuk itu. Kemudian juga listriknya juga tidak ada kan biasanya di situ, karena dianggap pengolahannya siang, sehingga tidak butuh listrik, padahal memerlukan. Air juga tidak apa, kadang-kadang menjadi persoalan juga. Mohon ini bagus, tetapi bagaimana *monitoring*-nya juga terhadap program-program ini, sehingga tidak hanya sekedar untuk berdiri setelah itu selesai, tetapi ada dampaknya, karena sampah inikan bukan menjadi persoalan yang sekali selesai, tetapi persoalan yang secara terus-menerus bisa di-apa, yang harus kita hadapi bersama-sama.

Oleh karena itu, untuk sampah ini, mungkin ada yang sudah apa pengolahan sampah ini ada seperti Sidoarjo dan seterusnya, tetapi mohon itu juga dievaluasi untuk kontinuitas dari hal tersebut. Jangan sampai, kita membangunnya besar loh untuk itu, kalau TPS tuh pengolahannya, tapi pada kenyataannya, fungsinya hanya, istilahnya kalau *wong Jowo* itu *sak gebyaran* begitu. *Sak gebyaran* itu, begitu dibangun kemudian diuji coba, selang beberapa saat, setelah itu stop. *Nah*, itu juga dibutuhkan *monitoring*, apakah program-program semacam ini perlu terus ada semacam, jadi tidak selesai begitu saja tetapi ada *monitoring*, kemudian evaluasi dan apa kira-kira langkah untuk hal tersebut. Jangan sampai kita hanya sekedar menganggarkan jumlahnya banyak dan mahal kadang-kadang bukan dari Rupiah murni, tapi dari utang, maka itu *muspro*, bahasa Jawanya, *muspro*.

Kemudian yang terakhir, tentu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua program yang telah diberikan kepada kami sebagai Anggota Komisi V untuk kepentingan masyarakat, baik program apapun yang telah kami terima dan itu sangat-sangat menjadi apa, satu kebutuhan masyarakat dan manfaatnya yang luar biasa, sehingga bagi kami program itu tidak harus dihentikan, tidak harus dikurangi apalagi yang sebelumnya sekian ratus. BSPS itu ada 100.000 kemarin, tetapi sekarang hanya 18.000 itu sangat-sangat jauh, merosot begitu.

Demikian.

Terima kasih, Pimpinan, ini yang bisa saya sampaikan, saya akhiri.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik.

Terima kasih, Bu Sri.

Lanjut Pak Sigit, silakan.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Menteri yang saya hormati dan jajarannya,

Masih sedikit yang bisa saya komentari dari laporan Pak Menteri Pekerjaan Umum. Memang anggarannya jauh merosot, pagu indikatifnya dibanding tahun sebelumnya. Tentu saya mendukung permintaan tambahan ya, agar total anggaran bisa sampai 200 triliun lebih. Memang kebutuhan untuk pembangunan di Indonesia masih sangat banyak, hampir semua bidang ditangani oleh Pak Menteri, mulai dari ketahanan pangan, aksesibilitas ya, kemudian sanitasi, mungkin juga hubungannya nanti sama *stunting*, karena sanitasi itu ada hubungannya erat dengan *stunting*.

Pak Menteri, saya hanya menyarankan beberapa poin. Poin yang pertama, marilah kita kembali kepada ide awal bahwa pembangunan jalan tol itu diprioritaskan bagi daerah yang atau diprioritaskan untuk, untuk yang memang layak ya dibangun. Pembangunan jalan tol sedapat mungkin minim kucuran APBN, ada pelibatan swasta yang maksimal. Oleh karena itu, tambahan, saya setuju tambahan tetapi tambahan kalau itu diguyurkan kepada beberapa jalan tol yang disampaikan di halaman 4, sepertinya masih harus dicek satu persatu lagi. Apakah ruas-ruas jalan tol seperti itu, misalnya akses Pelabuhan Patimban ya, Semarang-Demak ya, Serang-Panimbang itu masih relevan atau tol IKN Seksi 2 ya, itu masih relevan. Tidak bisakah itu ditangani oleh swasta. Jadi tidak banyak APBN kita yang keserap di jalan tol, sehingga nanti proporsi antara Direktorat Bina Marga dengan Direktorat Sumber Daya Air dan Direktorat Cipta Karya ada keseimbangan ya. Ini terasa *backbone* kita ada di Direktorat Direktorat Bina Marga. Anggaran tambahannya untuk program infrastruktur konektivitas saja 78 triliun. Saya kira itu satu poin, kami, mungkin nanti akan kita bahas di konsinyering ya, karena terus terang beberapa jalan tol cobalah untuk di *delete* dari kesertaan pemerintah, sehingga dananya bisa di alokasikan untuk, misalnya cipta karya, misalnya sampah.

Sekarang ini kota-kota kita darurat sampah, Pak Menteri. Terakhir saya baca di media itu sampah impor masuk, karena apa? karena pabrik-pabrik

kertas itu membutuhkan serat-serat panjang yang itu didapat dari sampah impor. Terus bagaimana penanganan kita, ya. Kita belum menjadi negara yang bebas kertas ya, tidak semuanya *paperless*, enggak bisa juga kita. Saya sendiri kalau disuruh baca WA, mending saya baca *hard, hardcopy*, iya. Enggak bisa *paperless* itu capek, di mata itu udah, apalagi kita udah tua-tua begini, mungkin kalau pemimpinnya nanti anak-anak muda, *gitu ya*, kalau presidennya usia 25 atau 30, gitu, mungkin bisa tercapai *paperless*.

Jadi saya minta ada, ada peran dari pemerintah pusat dari negara untuk urusan sampah ini. Tadi yang sebagian sudah disinggung oleh teman kami, dari Bu Sri Wahyuni, Bu Sri Rahayu, Bu Sri Rahayu tentang sampah, karena apa? inisiatifnya itu dari masyarakat sendiri, ini enggak bisa harus pemerintah yang turun. Saya pernah diundang oleh Pemkot Depok, saya lihat sampahnya setinggi 30 meter, dan itu bolak-balik ambruk begitu. Kalau sudah begitu harus ada peran dari negara, dan saya kira kembali lagi memang Kementerian PUPR ini sangat ditunggu kehadirannya ya. Kami berharap agar sampah itu dicarikan solusi oleh Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya.

Terus yang kedua, Sumber Daya Air juga begitu. Pembangunan 17 bendung, mohon dicek lagi, mungkin nanti kita akan dalam di konsinyering, apakah 17 beneran atau mungkin bisa dikurangi mana-mana saja yang yang *urgent*. Kalau enggak salah, Bagong pernah kita datangi ya, kalau enggak salah, di Komisi V, saya di Jatim itu Bendungan Bagong. Saya kira tidak semua bendungan perlu dianggarkan untuk 2025. Saya masih ingat mendatangi dua bendungan, yang pertama di Kalimantan Utara, Kaltara. Bendungannya itu masyarakatnya sudah *ndak* ada, karena *ndak* jadi-jadi bendungannya, sudah *ndak* ada masyarakatnya, sudah agak lama itu dan tidak ada, seandainya pun dibuat distribusi sistem irigasi dan seterusnya yang memanfaatkan juga tidak ada. Terus yang kedua, bendungan di Pulau Buru yang waktu itu juga belum selesai-selesai, mungkin sekarang juga belum selesai, Pak Menteri. Pertanyaannya kalau sudah bertahun-tahun *ndak* selesai direncanakan dan *ndak* selesai begitu, apakah masih relevan ada bendungan di sana.

Yang menjadi perhatian yang perlu adalah pembangunan pengendali banjir pengaman pantai, sehingga proporsi-proporsi anggaran di pengendalian banjir dan proporsi pantai bisa lebih besar, karena ini menyangkut lingkungan dan menyangkut masyarakat yang tinggal di tepi-tepi pantai serta masyarakat perkotaan yang kena banjir dan sehari-hari berminggu-minggu banjirnya.

Saya pernah mengusulkan kepada salah satu kepala balai, banjir Lamongan itu daerahnya saya lupa, tapi data-datanya sudah saya berikan kepada Kepala ini Solo Balai Solo ya, Balai Bengawan Solo, itu sehari-hari itu kalau banjir ya berminggu-minggu bahkan. Demikian juga Kota Sidoarjo ya, banyak yang kalau tidak dilakukan normalisasi di kali ini di kali ya, salah satunya yang melewati Kota Sidoarjo itu banjirnya akan sehari-hari. Jadi itu yang lebih penting, kenapa langsung berdampak kepada masyarakat. Saya kira proporsi anggaran itu mohon dicek ulang ya, tentu kami akan setuju ada penambahan anggaran tetapi peruntukannya itu yang perlu di apa ditengok ulang.

h

Kegiatan P3-TGAI, 2.000 lokasi di halaman 3, sangat kurang sekali saya kira, Pak Menteri. Mohon bendungan-bendungan besar itu di, di *keep* dulu, jangan dibangun dulu, bangun aja P3-TGAI yang banyak, karena itu langsung berdampak kepada masyarakat. Saya kira demikian ya, saya belum bisa memberikan pandangan lebih banyak, hanya proporsi saja. Proporsi Cipta Karya ditingkatkan, terutama yang terkait dengan sampah perkotaan, belum ada yang menangani, Pak Menteri, sampah perkotaan.

Sekarang penduduk desa kemungkinan sudah berkurang, karena pada pindah ke kota. Proporsi desa, proporsi penduduk desa-kota saya kira perlu ditengok dan kemudian proporsi anak-anak muda perlu ditengok karena kita mengalami apa..., apa namanya itu, kelebihan penduduk-penduduk muda dan itu ada di kota-kota. Jadi tolong perhatian terhadap perkotaan, banjir perkotaan, sampah perkotaan itu lebih diperhatikan dibanding dengan penambahan jalan tol yang sebetulnya swasta bisa masuk lebih besar perannya dibanding peran negara. Kemudian bendungan yang mungkin juga sudah tidak relevan untuk tetap dibangun dan dianggarkan.

Pak Ketua, terima kasih waktu yang diberikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik, terima kasih Pak Sigit.

Lanjut Pak Harvey, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (HARVEY B. MALAIHOLLO):

Terima kasih, Pimpinan.

Para Pimpinan lalu Anggota Komisi V yang saya hormati,
Pak Menteri beserta jajarannya,

Selamat siang.

Sedikit saja, saya langsung saja ke perumahan, Pak Menteri, khususnya rumah khusus.

Tadi di pemaparan Bapak, Bapak tidak menguraikan lokasi ataupun provinsi yang akan kena atau yang, yang masuk ke anggaran tahun 2025 ini, Bapak. Saya berharap dengan sangat rumah khusus Suku Moi itu bisa masuk ke dalam anggaran tahun 2025 ya, Pak.

Terima kasih banyak sebelumnya.
Terima kasih, Pak Pimpinan.
Selamat siang.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik, ini singkat padat.

Pak Herviano, silakan.

F-PDI PERJUANGAN (MOCHAMAD HERVIANO):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan serta seluruh Anggota Komisi V,
Pak Menteri dan seluruh jajaran Dirjen yang hadir,

Alhamdulillah, kita pertama-tama apresiasi atas kinerja Kementerian PUPR wabil khusus di bawah Pimpinan Pak Menteri selama 5 tahun, sesuai mottonya: "Sigap Membangun Negeri".

Kita doakan semoga Pak Menteri dan Kementerian PUPR selalu menjadi garda terdepan pembangunan dan juga Pak Menteri bisa jadi Menteri lagi. *Aamiin*. Itu pandangan saya pribadi, Pak, atau menjadi penasihat menteri, karena kinerjanya baik sekali. Kalau kata Pak Tamanuri dicoba dulu Menteri Desa.

Izin Pimpinan, biar nggak ngantuk, Pak ini, agak tegang-tegang. Jadi itu doa kami, Pak.

Yang berikutnya untuk pagu indikatif senilai 75 triliun ini memang hanya penyesuaian, Pak, dan kami tentu akan saling mendukung seperti Pak Hamka tadi sampaikan dan beliau-beliau lain supaya nanti ada penyesuaian anggaran dari pemerintah. Tetapi tetap supaya Renstra yang sudah dibuat ini betul-betul *output*-nya untuk peningkatan pembangunan berbasis kesejahteraan masyarakat, sejatinya itu, Pak.

Yang lain-lainnya, kami berharap sama, Pak, dengan senior lain supaya rekam aspirasi Dapil bisa diakomodir, karena itu juga dari masyarakat, Pak.

Yang berikutnya juga, bisa terus sigap membangun negeri. Dan kami, titip satu, Pak, mungkin mau nanya untuk progres Bendungan Jragung ya, Pak, itu kalau ada infonya kami boleh diberitahu, Pak, dan mudah-mudahan ke depan terkait infrastruktur air untuk penyediaan bahan dan pangan bisa lebih komprehensif, Pak.

Seperti kata senior kami, Pak Hamka, jadi yang sudah baik ini penyambungannya harus lebih baik agar *output-output*-nya untuk penyediaan air dan bahan pangan bisa terlaksana dengan baik.

Saya kira itu aja Pak nanti mungkin berikutnya kita bisa penajaman lagi di konsinyering.

Terima kasih Pimpinan, lebih kurangnya mohon maaf.
Terima kasih Pak Menteri dan jajaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik.

Dari Anggota semua selesai. Sekarang.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Izin.
Tambah sedikit boleh, Pak?

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Silakan, Bu Sri.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Iya, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Sigit, kemudian Pak Hamka juga, bahwa dengan banyaknya bendungan-bendungan yang dibangun, itu di daerah-daerah terutama yang saluran sekunder itu memang belum mendapatkan perhatian, sehingga kalau dibandingkan bendungannya kemudian saluran tersier, kemudian irigasi, itu masih sangat jauh, karena betul-betul bermanfaat, Pak, untuk irigasi tersier ini juga sangat bermanfaat.

Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa dengan adanya bangunan irigasi ini, air yang mengalir itu bisa bisa diukur, ditunggu. Airnya jam berapa bisa nyampai, kapan, itu bisa ditunggu. Tapi kalau kalau nggak dibangun irigasinya tersier, itu nunggu-nya lama karena air ke mana-mana, *gitu*, lari ke mana-mana bahkan tidak sampai pada tujuan, apalagi kalau musim kemarau seperti ini. Demikian juga sering kali saluran tersier juga demikian karena enggak dibangun, sehingga airnya juga lari ke mana-mana.

Satu lagi, ingin mengingatkan, Pak, yang dari Sumber Daya Air, khususnya Jawa Timur, enggak tahu Jawa Timur ada enggak balainya. Dulu pernah berkunjung bersama saya itu ada aliran-aliran sungai yang kemudian menerjang-menerjang banyak, apa sawah-sawah, apakah sekarang sudah ditindaklanjuti apa belum. Karena sekian-sekian apa kalau, kalau, kalau sawah itu di desa itu namanya kedok ya, petak ya, petak, itu *ndak* di apa, rusak diterjang air, karena ya gitu, itu saluran tersiernya kurang bagus begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik, selesai.

Pak Ridwan silakan.

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Makasih.

Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat,
Pak Menteri dan seluruh jajarannya,

Sebenarnya kalau kita melihat kinerja Pak Menteri ini, memang saya ingin mengatakan sudah sangat luar biasa, selama 10 tahun ini, memberi citra yang positif ya. Kita bisa lihat hasil monumental semuanya dari berbagai aspek kehidupan mulai pendidikan, kemudian pertanian, persawahan, jalan, kesehatan, dan semua, pasar, semua. Kita berharap yang dengan presiden baru ini, bisa mendapatkan pengganti yang minimal sama. Tapi dari semua apa yang telah dibangun oleh Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang begitu monumental di seluruh Indonesia ini dan menjadi buah bibir masyarakat yang positif. Terlepas terhadap pengamat-pengamat tertentu yang kadang

h

mengamati secara negatif tetapi saya ingin mengatakan 99% masyarakat Indonesia itu memberi apresiasi yang sangat luar biasa berdasarkan hasil komunikasi kami pada waktu turun di lapangan.

Tetapi saya ingin menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Sri tadi, tentang IBM. IBM itu *brand*-nya Bapak itu, Pak. Artinya mereknya Bapak sebagai Kementerian PUPR, karena sangat dirasakan manfaatnya. *Nah*, seandainya itu bisa dipertahankan terus-menerus siapapun pengganti Bapak, itu adalah pasti Bapak yang akan termaktus namanya. *Nah*, harapan saya apa yang disampaikan Bu Sri tadi mungkin bisa menjadi perhatian termasuk IJD. IJD itu luar biasa termasuk dari apa namanya, bendungan-bendungan itu, itu luar biasa deh, enggak usah kita ingkari lagi. Adapun pandangan masyarakat yang positif ini tentu biarlah nanti masyarakatnya akan merasakan langsung dalam perjalanan ke depan. Kita berharap sih kalau misalnya ada ya bisa terlanjut, tapi namun demikian adalah itu adalah kewenangan presiden itu sendiri.

Saya hanya itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan. Terima kasih Pak Menteri, ya dengan seluruh jajarannya. Saya sudah 10 tahun di sini bersama-sama Bapak dan Ibu semuanya. Saya ikuti betul perjalanan selama ini dan hampir saya tidak pernah bicara saya karena saya tahu betul ,apa kinerja Kementerian PUPR ini. Saya ingin sekali lagi mengatakan sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi ini buat, Pak Menteri.

Saya kira hanya itu yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Adapun urusan Dapil itu nanti kita kasih melalui melalui, dapat catatan saya kita berikan kepada Pak Menteri nanti sebentar.

Makasih, Pak Ketua.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Baik.

Semua sudah selesai dari Pimpinan, saya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan Saudara Menteri dan seluruh jajaran.

Yang pertama, ini karena kita bicara sesuai dengan amanat undang-undang, pertanggungjawaban terhadap Dapil, maka melihat perincian rencana kegiatan tahun 2025 per unit organisasi, saya ada berikan beberapa catatan yang mungkin akan kami sampaikan.

Yang pertama, tentang bidang sumber daya air, ya ini ada dana sekitar 26,53 triliun. Kegiatan di situ saya lihat-lihat Pak Menteri tidak ada satu nama Papua di situ, Pak Menteri. Jadi ini catatan-catatan penting untuk saya ya. Pembangunan irigasi 2000 hektar, ada Papua Barat Daya, ini di daerah Domberai ya, Papua Barat Daya ya. Saya kira di bicara irigasi ini menyangkut ketahanan pangan, padi, itu di Papua pasti orang melihat ada di Papua Selatan Merauke, dan Kabupaten Jayapura, dan Keerom, tapi saya lihat ini tidak ada di

dalam sini ya. Ada beberapa lagi yang memang perlu nanti mendapat perhatian khusus di dalam pembahasan nanti terutama buat Dirjen nanti yang akan kami lakukan.

Saya melihat bahwa pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 yang kami bahas ini sekarang cuman sebesar 76..., 75,63 triliun, yang terdiri dari Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Perumahan, Bina Konstruksi, dan SIJBP.

Teman-teman sekalian,

Saya harap bahwa di kesimpulan nanti kami menyetujui anggaran globalnya saja dulu senilai Rp75,63 triliun ini, tetapi untuk para Dirjen, saya kira, kami kan masih punya waktu nanti untuk konsinyering. *Nah*, kan di dalam konsinyering itu nanti kami harus bisa membedah betul program-program yang memang betul-betul berdampak kepada masyarakat ya, agar rencana yang sudah disampaikan oleh kementerian ini per Dirjen ini, menurut saya ini belum final. Nanti akhirnya mungkin kita akan lakukan konsinyering. Begitu, Pak Sigit ya? Seperti yang tadi Pak Sigit sampaikan juga kan? iya. Jadi agar kita semua saya kira di dalam konsinyering ini nanti baru kita bisa melihat apakah Dirjen Sumber Daya Air ini layak dapat 26,53 triliun tidak, begitu. Jadi supaya teman-teman semua.

Saya kira, saya sangat berterima kasih, Pimpinan sudah bisa membuat rapat kita ini kembali ke *khittah*-nya kita, bahwa kita harus konsinyering untuk bisa melihat satuan tiganya, agar itu bisa lebih bermanfaat kepada, oh *khittoh* ya? *wah* itu Pak Sigit yang tahu soalnya, kembali ke *khittoh* ya, Pak Sigit, ya agar betul-betul nanti program-program ini ya seperti masih ada perhatian khusus terhadap IKN, ya kan, yang tadi disampaikan Saudara Menteri, ya kan. *Nah*, ini mari kita lihat bersama ya kan, karena saya kira semangat dari Presiden Jokowi untuk IKN, kemarin kami sudah mendukung penuh, sudah terlaksana upacaranya sudah selesai ya, maka mungkin ya kita bicara pembangunan IKN kan masih harusnya, mari kita buat satu rancangan jangka panjang yang baik agar semua pembangunan itu bisa merata dan adil pada masyarakat kita. Jadi karena masih banyak masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan infrastruktur dasar untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka.

Jadi selaku Pimpinan, saya ingin supaya kita sebagai wakil rakyat betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat apalagi di dalam meningkatkan taraf hidup rakyat-rakyat kecil yang masih belum terjangkau ya. Jadi ini yang paling penting untuk saya sampaikan agar di dalam kesimpulan nanti betul-betul kita fokus, bahwa kami dapat menerima dengan anggaran yang sudah disampaikan cuman 75,63 triliun ya.

Kami sadar bahwa masih ada slot anggaran yang diberikan untuk nanti pemerintahan baru karena pemerintah baru akan menepati janji-janji politik yang sudah sampaikan, itu memang harus kami tinggalkan slot itu untuk bisa nanti dibahas oleh DPR yang akan datang untuk bisa memenuhi semua janji-janji politik yang jangka pendek yang sudah disampaikan oleh Presiden terpilih nanti.

Saya kira itu yang dapat kami sampaikan.

Kami persilakan untuk tanggapan dari Saudara Menteri. Saya kira ini rapat yang agak pendek, Pak Menteri ya. Anggota minimalis yang hadir semua. Sudah clear semua kemarin kita dengan Pak Sekjen sudah clear, Pak Menteri. Kita harapkan bisa demi rapat-rapat di, lebih cepat, lebih singkat tapi lebih bermanfaat.

Silakan, Saudara Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Menanggapi arahan dari Bapak-Ibu sekalian, izinkan kami menanggapi beberapa hal.

Pertama, pasti kami catat semua yang disampaikan oleh Ibu-Bapak sekalian. Untuk Bapak Hamka ada 2 hal tadi renovasi sekolah dan lumbung pangan nasional sebagai program *quick wins*-nya Bapak Presiden terpilih. Renovasi sekolah yang akan dipindahkan ke PU, kami mendapat informasi bahwa sudah dilakukan rapat-rapat antara Direktur Strategis kami, Pelaksana Strategis Cipta Karya ada rencana memindahkan DAK fisik sebesar Rp14 triliun ke Kementerian PUPR untuk dilakukan renovasi sekolah-sekolah sesuai program yang telah ditetapkan. Jadi anggaran renovasi sekolah nampaknya berasal dari pemindahan alokasi DAK.

Kemudian untuk lumbung, lumbung pangan nasional dalam usulan kami yang tambahan di halaman 7, bahwa tambahan anggaran sebesar 61,31..., 61 triliun ini, pertama kali prioritasnya adalah mendukung ketahanan pangan dan energi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu, *eh* Bu Sri Rahayu dan Pak Sigit, di dalam usulan anggaran 75 triliun, itu tidak ada pembangunan bendungan baru, hanya semuanya untuk penyelesaian. Bendungan baru akan dilakukan kalau ada tambahan 61 triliun dan itu pun untuk 61 triliun akan kita gunakan untuk melengkapi bendungan-bendungan yang sudah selesai dengan jaringan irigasinya. Beberapa bendungan sudah ada jaringan irigasinya, namun belum optimal, itu kita optimalkan. Ada yang sudah ada jaringan irigasinya kita rehabilitasi, ada yang belum ada jaringan irigasi, saat ini sudah disiapkan desainnya sehingga nanti pemerintah baru bisa meneruskan kelengkapan dari bendungan tersebut. Kalau tadi sampaikan, apakah masih ada relevansinya untuk diselesaikan? Iya, Bapak, karena semua bendungan itu sudah, kecuali Cibeet dan Cijuray yang baru saja dimulai itu progresnya sudah di atas 60% semua sehingga kita harus selesaikan dan itu kenapa baru diselesaikan bukan

h

hanya karena teknis, tapi karena juga anggaran kita jereng-jereng pada saat covid kemarin.

Jadi atas ada apa namanya, apa yang yang *focus...*, *focusing* itu *refocusing* kita jereng yang tadinya harus progresnya 1 tahun dijadikan 2 tahun. Jadi kita *jereng-jereng*. Jadi ada *policy* dari penganggaran. Jadi mohon, saya sangat setuju kalau jalan tol harus kita fokuskan untuk yang purely *investment*, sehingga meminimalisasi dukungan konstruksi untuk jalan tol. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua bisa karena arahan Presiden, mana yang mau didahulukan? perekonomiannya naik dulu, baru dibikin jalannya, atau jalannya dulu untuk memotivasi perekonomian? Jadi antara telur dan ayam. Jadi kadang yang harus kita bangun jalannya tidak hanya jalan tol hanya karena untuk meningkatkan perekonomian kita.

Kemudian untuk IBM, saya kira yang kami sampaikan di sini adalah dengan anggaran 75 triliun tersebut. Tapi kalau nanti ada anggaran tambahan, pasti yang akan kita tambahkan dulu dan itu mesti akan melalui Bapak-Ibu sekalian untuk menambah IBM. Jadi tadi kalau Bapak Ketua menyampaikan kesimpulannya nanti adalah menerima 75 triliun, saya mohon koma, masih ada komanya untuk tetap mendukung adanya tambahan kebutuhan anggaran itu, Pak. Jadi jangan di titik, tapi di koma.

Kemudian untuk Ibu Sri Rahayu tentang tanggung jawab apa kewenangan air tanah. Kewenangan air tanah ini ada di Kementerian ESDM, yang dulu di kabupaten, kemudian dinaikkan provinsi, sekarang dinaikkan ke pusat. Kami hanya merekomendasikan di suatu daerah ada sumber air permukaannya atau tidak. Kalau masih ada sumber air permukaannya, kami rekomendasikan untuk perizinan memanfaatkan air permukaan sebelum memakai air tanah. Jadi kewenangan kami pada rekomendasi teknis untuk penerbitan izin pemanfaatan oleh Kementerian ESDM.

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Izin, izin Pimpinan.

Pak, yang terkait tadi di wilayah Kementerian ESDM begitu ya?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Iya. Jadi kami tidak...,

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Terus...,

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Kami pun kalau...,

F-PDI PERJUANGAN (SRI RAHAYU):

Peran kementerian atau Sumber Daya Air, apa ini?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Tadi yang kami, kami pun mengebor air tanah itu, kami izin pada Kementerian ESDM ya. Kami merekomendasikan teknis seperti halnya kalau pengambilan galian C di sungai, kami memberikan rekomendasi teknis, apakah itu menjadi abrasi atau tidak. Jadi nanti ESDM yang mengeluarkan izinnya. Air tanah juga begitu, kami merekomendasikan di satu wilayah sungai kalau masih ada sumber air permukaannya, maka ESDM tidak akan mengeluarkan izin pemanfaatan air tanahnya di wilayah sungai tersebut.

Kemudian yang untuk JLSS Malang Selatan-Trenggalek, memang kami sedang mengusulkan kepada, akan didanai oleh *loan* ADB dan ISDB, jadi saya kira ini akan segera tersambung, karena hanya tinggal di Jawa Timur saja yang JLS ini belum tersambung.

Kemudian untuk IJD yang juga sangat kita tunggu atau kita rasakan manfaatnya, besok pagi akan dilakukan penelahaan lagi di Direktorat Jenderal Anggaran karena seperti kami melaporkan Raker kemarin untuk Inpres Air Minum dan Air Limbah sudah dibahas dan sudah ada persetujuan dari Kementerian Keuangan, sedangkan IJD belum ada. Besok mau dibahas lagi ada anggaran 900 miliar kalau Ibu-Bapak sekarang ingin programkan itu, kami persilakan.

Kemudian saya sangat setuju juga dengan TPS-3R harus dievaluasi. Justru kami juga, karena Anggota DPR selalu ada di Dapil, kami mohon, mohon maaf, kami mohon bantuannya juga kalau ada informasi TPS-3R yang tidak berfungsi dan ada hal-hal yang kurang bermanfaat mohon kami diinformasikan pasti akan kami tindak lanjuti.

Kemudian untuk Jragung, jadi untuk 20 hektar kawasan hutan yang dipakai yang akan dipakai untuk merelokasi penduduk, saya kira sudah selesai masalahnya dan penduduk sekarang sudah mulai pindah, sehingga kita akan segera bisa menyelesaikan. Sekarang progresnya berapa? Sekarang progresnya adalah 75%, jadi mudah-mudahan akan segera dapat kita selesaikan.

Khusus Pak Harvey walaupun tidak tertulis saya selalu ingat itu adalah untuk Suku Moi di Sorong. Saya kira Pak Dirjen Perumahan sudah melakukan itu.

Demikian Bapak yang dapat kami, sekali lagi untuk padat karya, kalau nanti ada tambahan, pasti akan, akan mengikuti itu, Pak, dan semua akan dibahas di DPR. Termasuk Pak Tamanuri tadi untuk yang ITERA, ITERA, kami akan perhatikan keseluruhannya.

Terima kasih ya, Pak, kurang lebihnya dan saya sekali lagi mohon khususnya untuk tambahan anggaran, Pak Hamka nanti saya dengan Bu Menteri Keuangan, Bapak di benda, di Badan Anggaran, saya kira supaya ketemu. Nanti saya akan mohon juga dengan Bu Menteri Keuangan.

Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Ya, terima kasih Pak Menteri ya.

Saya agak ingat sedikit, Pak Menteri, karena tadi Bapak sampaikan soal ketahanan pangan dan sebagainya. Iya, saya sekarang ini kami di Papua banyak sekali beredar isu karena ada semangat pemerintah untuk buka lahan 1,9 juta hektar yang ada di....

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Merauke.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Merauke ya, untuk dalam rangka program ketahanan pangan.

Saya, saya beberapa kali ke sana, Program P3-TGAI itu, saya melihat masih banyak kebutuhan masyarakat dalam pendampingan dan maupun untuk peningkatan produktivitas masyarakat di dalam meningkatkan hasil di daerah. Kami buat P3-TGAI Irigasi yang kami sampaikan, tetapi airnya itu harus dipompa, harus ditampung dulu. *Nah*, mereka butuh sebenarnya embung-embung untuk penampungan-penampungan, ini masih belum, masih belum, masih banyak sekali yang belum ada mendapat perhatian untuk itu.

Maka saya minta supaya saat ini menjadi catatan juga untuk Saudara Menteri dan jajaran, karena ya kita mau buka baru sedangkan yang ada saja ini harusnya menurut saya kita revitalisasi mereka lagi, inovasi agar produktivitas ini bisa lebih lagi. Jangan-jangan kita buka baru juga sama juga gitu, iya kan. Jadi karena nanti buka baru itu hutan akan habis, dihabisin hutannya ya kan. Lahan karena di sana masih ada hutan yang akan

dikorbankan untuk menyiapkan untuk lahan pertanian sedangkan yang ada sudah ada lahan pertanian ini, saya kira ini bisa lebih ditingkatkan lagi, kalau itu dilakukan pendampingan yang baik, terus kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang memang harus segera dibutuhkan begitu. Jadi itu catatan saya untuk Saudara Menteri.

Saya kira sudah ya? Semua selesai ya?

Ada tambahan? apa? kalau yang ini enggak perlu nanti kita di konsinyering saja, lebih enak.

Apa? boleh.

F-PKS (Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Pak Menteri, selama ini sudah ada swasta yang terlibat dalam pembangunan jalan tol ya. Bisakah ada skema baru keterlibatan masyarakat untuk pembangunan jalan tol? *crowdfunding*, *crowdfunding* yang ini sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan macam Gojek, dimana mereka melakukan investasi, menarik investasi dari masyarakat. *Nah*, jalan tol kita ini misalnya, kami ada jalan tol tengah kota misalnya, kami penduduk mana Jakarta berinvestasi untuk jalan tol baru, tengah kota, atau penduduk sekitar IKN ya di, tapi ini masyarakat semua. Mereka pasti akan bangga kalau, ini saya punya saham di sini. Jadi swastanya itu diganti dengan *crowdfunding*, *funding* orang banyak kira-kira begitu lah, Pak Menteri. Bisakah itu di-apa namanya, dicarikan skemanya, sehingga kita ini tidak ketemu dengan swasta itu-itu saja. Masyarakat bisa menikmatinya kalau jalan tolnya ramai, otomatis uang mereka, simpanan mereka akan bertambah ya.

Saya kira itu saja usulan kepada pemerintah ya, Pak Menteri, yang selama ini tadi itu ada telur dan ayam, ini yang mana, kira-kira, dua-duanya kita anu bareng, Pak Menteri. Ayam dan telurnya kita ambil semua, tetapi dari mana dananya, dananya dari *crowdfunding* dan itu sudah umum di dunia bisnis swasta saya kira.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Pak Sigit, ayam dan telur makan aja dua-duanya.

Baik, demikian lah Saudara-Saudara tanggapan dan jawaban dari Menteri PUPR.

Apabila tidak ada lagi hal-hal yang perlu dibahas, maka sesuai dengan ketentuan Tata Tertib Pasal 283, kita akan merumuskan Kesimpulan atau Keputusan Raker pada hari ini untuk kita sepakati dan kita tandatangi bersama, baik. Tolong, kesimpulannya, oke.

Baik saya bacakan ya.

Draf Kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 28 Agustus 2024

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian PUPR terhadap alokasi anggaran Kementerian PUPR dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI Nomor: S-612/MK.02/2024 dan B-480/D.8/PP.04.03/07/2024, hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian atau Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau Lembaga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Kementerian PUPR pagu kebutuhan:

A. Rp136.944.971.043.000,00.

B. Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025
Rp75.632.263.316.000,00.

Selisih A dan B Rp61.312.707.727.000,00.

Selanjutnya, Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian PUPR akan memperjuangkan usulan penambahan anggaran sebesar 61,31 triliun sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di DPR RI.

2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar:

a. menyesuaikan alokasi pagu anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI yang akan dibahas lebih rinci dengan unit organisasi Eselon I pada rapat yang akan datang;

b. menambah alokasi anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat di tahun anggaran 2025;

c. meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan; dan

d. meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan jalan tol.

Itu Pak Sigit, sudah itu.

Ada tambahan?

Anggota?

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Izin, Pimpinan.

Tolong di turun, turun dikit.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Poin berapa?

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Poin yang *backlog*-nya tadi 61 ya.
Ini 61 ini tidak masuk di IKN ya, Pak Menteri?

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Sudah masuk, sudah ya.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Sudah?

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Sudah ada di dalam.

F-PG (DRS. HAMKA B. KADY, MS.):

Kalau melihat jumlahnya sini, Pak Menteri, pertama 613..., 61,31 sudah termasuk IKN 20 sekian? Sudah, Pak?

Oke.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Oke ya?
Baik.

Anggota setuju?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Setuju.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ya, Saudara Menteri?



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Kalau yang nomor, yang nomor 2 (b) menambah alokasi anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat di RAPBN tahun 2025, apabila pagunya bertambah, Bapak. Kalau pagu 75 kan susah nambahnya. Jadi kami *committed* bahwa kalau ada tambahan anggaran akan kita prioritaskan untuk IBM.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Anggota?

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Perlu penjelasan.

Maaf, Pak Ketua, lewat Ketua.

Perlu penjelasan pagunya bertambah berapa maksudnya?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Ya, itu yang tadi, yang diusulkan berapa pun nanti akan penambahannya kalau diatas 75, maka akan kita tambahkan juga ke IBM. Nanti kalau enggak, kita *dispute* lagi, nanti saya dimarahin lagi.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Iya, Saudara Menteri, saya kira kan jelas bahwa poin a ya.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian untuk menyesuaikan alokasi pagu anggaran sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR RI, bahwa berarti kami masih bisa slot-nya terbuka, iya kan.

Jadi kan kami masih bisa berbicara di setiap Eselon I ini yang tadi kami sampaikan bahwa kalau itu misalnya ada yang kami merasa bahwa ini enggak perlu. Misalnya IKN, ya IKN sekian saja lah, kalau kita minta kan kemarin sudah ini, yang ini mungkin nanti berikutnya kalau ada penambahan, iya kan. Ini yang mungkin menurut saya hak daripada Anggota punya hak juga untuk bisa berbicara dengan pemerintah. Artinya kan pemerintah datang kepada DPR untuk minta persetujuan dengan anggaran ini, ya kan. Kami juga masih bisa memberikan tambahan programnya menurut kami, kalau ini kami tidak setuju gitu.

Jadi saya kira Saudara Menteri, kami tidak boleh dimatikan dulu, ini kalau ada ini ya, mari kami berbicara dulu, Pak. Ruang ini kami buka dulu untuk kami berbicara nanti. Di dalam diskusi nanti kalau memang itu enggak bisa ya

h

sudah, tapi jangan langsung ditutup, bahwa Anggota tidak bisa lagi masuk ke sana. Menurut saya itu. Betul teman-teman? Ya, jadi saya kira itu, Pak Menteri. Jadi kita tidak tidak dulu kita di ditahan dulu, Pak Menteri. Buka dulu kita, Anggota silakan tapi kami akan berbicara nanti Pak Menteri, mungkin itu. Ya, teman-teman ya?

F-PG (IR. RIDWAN BAE/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI):

Tapi apa yang sampai Pak Menteri tadi juga terus sesuatu yang dialami langsung oleh Kementerian, dalam hal ini Pak, dari pandangan Pak Menteri. Barangkali untuk yang A ini ada tambahan diusahakan ya, diusahakan menambah alokasi anggaran untuk program. Jadi ini tergambar kalau ada kesulitan di Kementerian itu bisa tidak bertambah tapi kalau tidak ada kesulitan berarti nanti bisa bertambah. Apa yang dimaksud oleh Pak Roberth dan Pak Menteri juga bisa sejalan. Jadi ada tambahan diusahakan ya, menambah alokasi anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat di RAPBN tahun anggaran 2025, *gitu*.

Makasih, Pak.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Pak Hamka?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Setuju.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Setuju?
Pak Hamka?
Pak Sigit?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Yowes. Yowes. Yowes.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Untuk yang poin d, kalau boleh izin, saya mau perbaiki kata-kata yang lebih sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi.

Jadi poin d itu meningkatkan keterlibatan masyarakat, partisipasi keterlibatan publik dalam pembangunan jalan tol.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Pakai dan aja, Pak.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Kenapa?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Pakai dan, swasta dan partisipasi publik.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Kalau swasta kan sudah terlibat, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Meningkatkan.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Artinya kita ingin memberi alternatif lain. Pemerintah membuka alternatif lain dengan keterlibatan public, agar mereka juga bisa menjadi pemilik.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Oke.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Publik ini bisa menjadi pemilik jalan tol seperti perusahaan swasta terkait.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Siap.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Begitu, Pak Ketua, usulan kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Poin d ya?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Itu swastanya dihapus. Swastanya dihapus, Pak.
Dan “nya” dihapus, iya, oke.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Bisa bicara?

Ini kata meningkatkan ini berarti sudah sudah terlibat sekarang ini, Pak Menteri?

ANGGOTA KOMISI V DPR RI:

Belum.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Ya jangan ada kata meningkatkan dong kalau, kalau meningkatkan berarti sudah ada barangnya.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Iya betul, Pak, belum, berarti apa itu kata-katanya?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Mendorong. Mendorong?

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Iya boleh.
Mendorong keterlibatan, iya.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Iya lah.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Jadi d, mendorong keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan jalan tol.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Saya kira ini....

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Oke, Pak Sigit?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Ini hal baru bagi saya.

F-PKS (IR. H. SIGIT SOSIANTOMO):

Saya ber, Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri bisa wujudkan ini biar dikenang sepanjang, sepanjang sejarah perkembangan Indonesia. Indonesia jadi maju ini di antaranya ini.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Iya, teman-teman? oke?
oke ya? oke, baik.

Jadi poin 2:

Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR agar:

- a. Menyesuaikan alokasi pagu anggaran RAPBN tahun anggaran 2025 sesuai dengan usul dan saran Komisi V DPR RI dan akan dibahas lebih rinci dengan unit organisasi Eselon I pada rapat yang akan datang;
- b. Mengupayakan penambahan alokasi anggaran untuk program infrastruktur berbasis masyarakat di RAPBN tahun anggaran 2025;
- c. Meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan; dan yang
- d. Mendorong keterlibatan partisipasi publik dalam pembangunan jalan tol.

h

Semua apa, Saudara Menteri, oke?

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (DR. IR. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.SC.):

Setuju, Bapak.

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Setuju?

Baik semua setuju ya?

Oke. Baik.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Pimpinan,
Anggota Komisi V DPR RI, dan
Menteri PUPR yang kami hormati,

Dengan telah disepakatinya beberapa kesimpulan dan keputusan tersebut, maka rangkaian acara Rapat Kerja pada hari ini telah kita selesaikan. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat.

Sebelum rangkaian acara rapat hari ini ditutup, kami memberikan kesempatan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan sambutan penutup.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (Dr. Ir. MOCHAMAD BASUKI HADIMOELJONO, M.Sc.):

Bapak-Bapak Pimpinan,
Ibu-Bapak Anggota Komisi V DPR RI yang terhormat dan kami hormati,

Terima kasih atas arahannya pada rapat hari ini untuk mempertajam program kerja Kementerian PUPR tahun 2025 nanti. Mudah-mudahan ini merupakan awal yang baik, saya kira komunikasi kita tetap terjaga dengan baik. Mudah-mudahan yang akan kita rumuskan akan menjadi program yang baik untuk di 2025.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

h

KETUA RAPAT (ROBERTH ROUW/WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI/F-NASDEM):

Walaikumsalam.

Baik.

Demikianlah Saudara-Saudara rangkaian acara rapat pada hari ini, kita selesaikan. Semoga hal-hal yang telah kita diskusikan dan kita putuskan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara. Aamiin.

Apabila tidak ada hal-hal lain yang perlu kita bicarakan maka rapat kerja pada hari ini dapat kita tutup dengan mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.09 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

Jakarta, 28 Agustus 2024
a.n. **KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

TTD.

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.
NIP. 196912021998032002

h